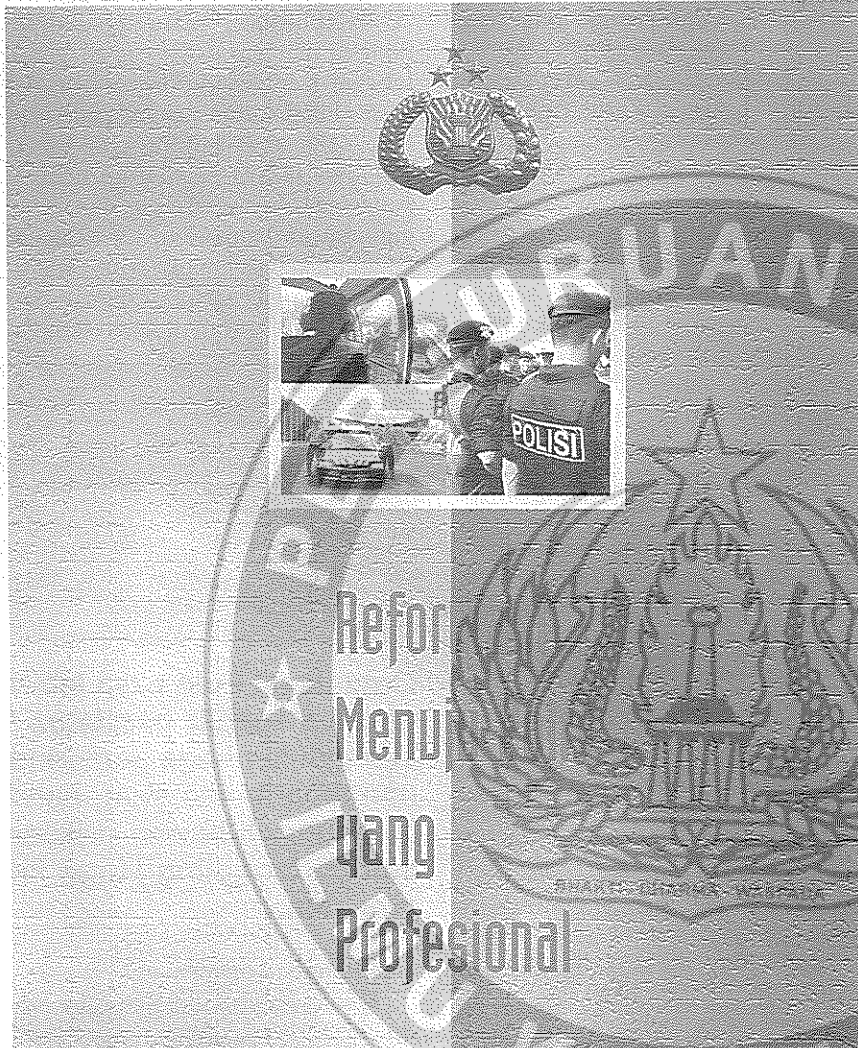


Yang Perlu Anda tahu tentang "Buku Biru" Polri



Berbagai upaya telah dipersiapkan pimpinan Polri untuk menyongsong kemandirian dan profesionalisme Polri. Salah satu buku yang berisi konsepsi tentang kemana Polri akan melangkah menyongsong masyarakat madani, sesuai dengan tuntutan reformasi telah beredar 1 Juli 1999. Agar para anggota tidak tahu sekadar atau kulit luarnya saja tentang konsep Polri mandiri, Redaksi *Rastra* membuat cuplikan-cuplikan, beberapa isu penting:

Pahami 5 Hal

1. Bahwa pemisahan Polri dari struk-

tur ABRI sejak 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat madani yang demokratis, aman, adil dan sejahtera.

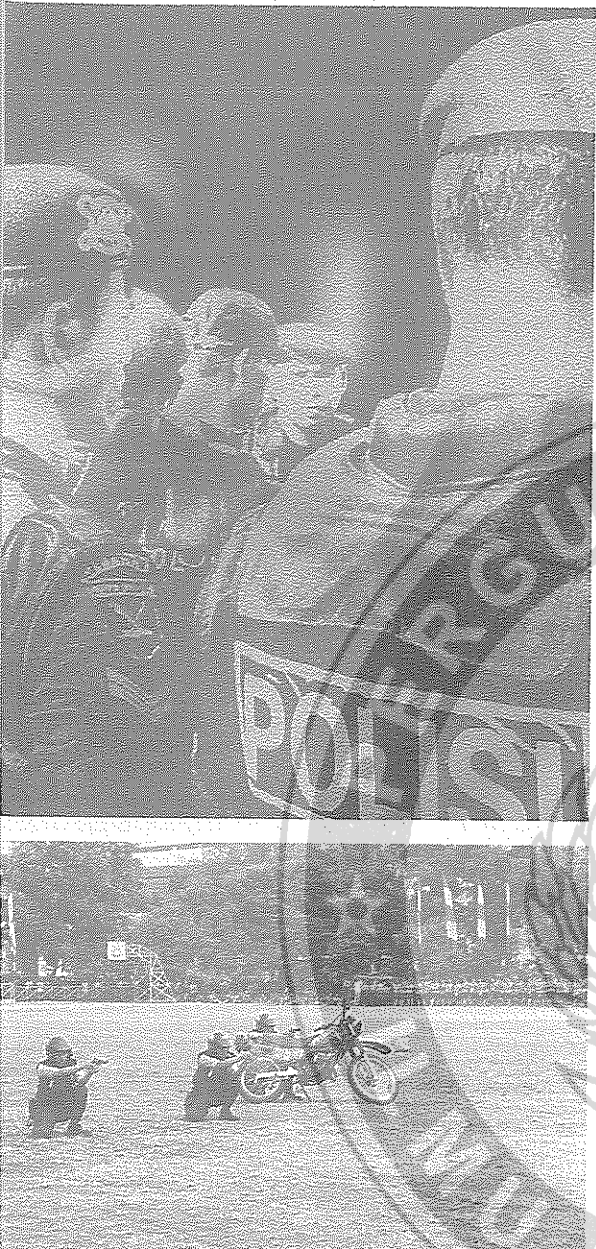
2. Ketajaman dalam menangkap berbagai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian merupakan suatu keharusan. Kepekaan (sensitivitas) tersebut lebih diproyeksikan pada peningkatan kewaspadaan dan ketanggap-segeraan melalui

berbagai upaya antisipasi yang efektif dan proaktif serta mengembangkan model pemolisian yang berpihak kepada masyarakat (protagonis), berorientasi pada pemecahan masalah-masalah masyarakat dengan berbasis pada kedekatan pada masyarakat yang lebih manusiawi.

3. Bahwa masalah profesionalisme Polri mencakup masalah jatidiri Polri yang terkesan militeristik, kualitas intelektual pegawai Polri terutama Bintara/Tamtama yang lebih rendah dari rata-rata anggota masyarakat umum, sikap kerja yang kurang memperhatikan kekhasan masyarakat lokal, orientasi kerja yang hanya karena perintah atasan bukan karena kebutuhan masyarakat, dan kemandirian lembaga yang sering diintervensi oleh lembaga di luar Sistem Peradilan Pidana, di samping keterbatasan sumberdaya yang sangat berpengaruh kepada kualitas kemandirian dan profesionalisme Polri, sehingga diperlukan upaya perubahan baik aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural guna mewujudkan Polri yang profesional.

4. Bahwa reformasi Polri diarahkan kepada perubahan aspek struktural berupa Polri yang otonom sebagai lembaga pemerintah nondepartemen langsung berada di bawah presiden, perubahan aspek instrumental terutama tentang perubahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 dan perubahan aspek kultural yang mencakup manajemen sumberdaya dan manajemen operasional serta sistem pengawasan oleh masyarakat.

5. Keberhasilan reformasi Polri bukan hanya ditentukan oleh Polri, tetapi juga oleh peran serta masyarakat terutama elit politik dalam mewujudkan Polri yang profesional, yang mampu menjawab



tantangan masa depan, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Aspek Integral Reformasi Polri

Penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam era reformasi memerlukan penyesuaian dan perubahan aspek struktural, instrumental dan kultural dengan paradigma baru reformasi dan tantangan tugas masa depan. Hal tersebut akan berkaitan dengan jati diri organisasi (struktural), jati diri fungsi, otonomi kewenangan dan kompetensi (instrumental) serta jati diri sikap dan perilaku kepolisian (perorangan dan satuan) yang tercermin

dari budaya pelayanan kepolisian.

Jatidiri dan organisasi yang terkesan militeristik, yang terlihat dalam sikap dan prosedur pelayanan yang kaku, kualitas intelektual rata-rata Bintara dan Tamtama Polri yang lebih rendah dari anggota masyarakat umum, sikap dan metode kerja seragam yang kurang memenuhi kebutuhan khas masyarakat lokal, orientasi kerja yang hanya karena perintah atasan, bukan karena kebutuhan masyarakat, dan kekurang mandirian lembaga, akibat adanya intervensi lembaga eksternal di luar Sistem Peradilan Pidana memerlukan perubahan menuju kepada jati diri sebagai abdi masyarakat, dengan kualitas intelektual di atas rata-rata anggota masyarakat umum, mempunyai sikap, metode dan orientasi kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani, serta mandiri terbebas dari intervensi lembaga lain di luar Polri.

Di samping itu adanya berbagai keterbatasan di bidang sumber daya baik secara kuantitas, yang berpengaruh pula terhadap kualitas kemandirian dan profesionalisme Polri perlu mendapat perhatian untuk dapat diatasi/dicukupi.

Perubahan Aspek Struktural

Perubahan struktural akan mencakup perubahan kelembagaan (institusi) kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.

■ **Institusi:** Dari segi kelembagaan telah diakui bahwa penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam ketatanegaraan oleh badan yang disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai perangkat lembaga pemerintah nondepartemen yang langsung berada di bawah presiden.

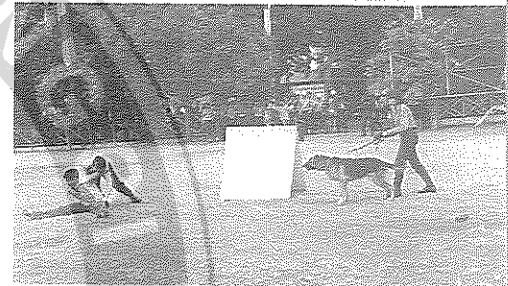
Dari segi kelembagaan, penyelenggaraan fungsi kepolisian bersifat otonom dan mandiri.

■ **Organisasi, susunan dan kedudukan.** Dari penelitian dan kegiatan ilmiah serta pendapat berbagai pihak dapat disimpulkan bahwa organisasi Polri akan lebih otonom apabila berstatus sebagai lembaga pemerintah nondepartemen yang berada langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dengan status organisasi tersebut,

diharapkan Polri akan memiliki peluang yang lebih besar untuk lebih meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya organisasi Polri yang baru harus memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :

● Kepolisian Negara Republik Indonesia menganut *integrated system* sebagai Kepolisian Nasional Indonesia. Pendekatan pengorganisasian Polri sebagai Polisi Nasional dilaksanakan secara *bottom up* dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas kepada kesatuan kewilayahan, terutama Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD) dan Polsek sebagai



Organisasi Polri akan lebih otonom apabila berstatus sebagai lembaga pemerintah nondepartemen yang berada langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

ujung tombak operasional.

● Wilayah Hukum Kesatuan Kewilayahan Polri, disusun menyesuaikan pembagian wilayah pemerintahan daerah dan sistem peradilan pidana serta perkembangan masyarakat.

● Organisasi Polri disusun tanpa birokrasi yang panjang agar dapat menjamin pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sehingga masyarakat merasakan dan puas akan pelayanan Polri. Oleh karena itu organisasi Polri harus hemat struktur tetapi kaya fungsi.

● Struktur organisasi yang lebih bersifat *network* dan tidak selalu piramidal sehingga kerja sama terus dapat dikembangkan.

Perubahan Aspek Instrumental

Perubahan aspek instrumental

akan mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek.

Filosofi: Disimak dari kandungan nilai Pancasila dan Tribrata secara filosofi memuat nilai-nilai kepolisian sebagai abdi utama, sebagai warga negara teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat.

Visi Polri:

Alat negara penegak hukum; pemeliharaan keamanan dalam negeri yang profesional, dekat dengan masyarakat, bertanggung jawab dan



mempunyai komitmen terhadap masyarakat.

Misi Polri:

- Menegakkan hukum secara adil, bersih dan menghormati HAM.
- Memelihara keamanan dalam negeri dengan memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.
- Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.
- Mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Tujuan Polri:

Terwujudnya keamanan dalam negeri, yang mendorong gairah kerja masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Doktrin Polri: Tata Tentrem Kerta Raharja

Sebelum berintegrasi dalam ABRI, doktrin Polri adalah *Tata Tentrem Kerta Raharja*. Dengan integrasi ABRI, semua doktrin Angkatan Perang dan Polri diintegrasikan dan diberlakukan doktrin ABRI. Dengan pemisahan Polri dari ABRI, maka Polri kembali pada doktrin *Tata Tentrem Kerta Raharja*.

Tata Tentrem Kerta Raharja berisi ajaran bahwa untuk mencapai tujuan nasional yang berupa masyarakat Indonesia yang adil dan makmur (*ra-*

harja) dipersyaratkan adanya suasana gairah untuk membangun (*kerta*). *Kerta* hanya akan terwujud melalui pembinaan *tentrem* atau terwujudnya keamanan dalam negeri. Sedangkan *Tentrem* (yang mengandung dimensi *security, surety, safety* dan *peace*) hanya terwujud jika ada *tata* (ketertiban yang berdasarkan hukum).

Dengan doktrin ini perilaku yang menjunjung tinggi supremasi hukum, hak asasi manusia, budaya hukum menjadi acuan dalam mewujudkan keamanan dalam negeri.

Doktrin Polri, merupakan pandangan yang diyakini kebenarannya dan mempengaruhi perilaku anggota Polri dan atau kelompok pada organisasi dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuan organisasi Polri.

* Aspek *inward looking*, bagian

doktrin Polri yang memuat tentang doktrin pembinaan Polri, bersifat pandangan tentang penyusunan kemampuan dan pembangunan kekuatan, yang sesuai dengan tuntutan tugas.

* Aspek *outward looking*, bagian doktrin Polri yang memuat tentang doktrin operasional Polri, mengidentifikasi bentuk-bentuk tugas, pengembangan sistem, metode, taktik dan teknik pelaksanaan tugas pokok, serta pandangan Polri tentang lingkungan (masyarakat) menurut pandangan operasional Polri.

Kode Etik Polri

Selain instrumen hukum dan undang-undangan yang menjadi batasan sikap dan perilaku kedinasan Polri, masih diperlukan adanya kode etik Polri yang akan membimbing sikap dan perilaku yang memperhatikan etika profesi kepolisian baik perorangan maupun satuan.

Sebagai suatu profesi Polri memiliki kode etik Polri, suatu kode etik pada hakekatnya berisi nilai-nilai ideal tentang suatu profesi dan sekaligus *statement of guide line (code of conduct)* yang merupakan prinsip moral profesi kepolisian.

Kode Etik Polri berisi nilai ideal tentang Polri yang bersumber dari Pancasila, Tribrata dan Catur Prasatya. Nilai ideal tersebut pada dasarnya berupa jatidiri Polri sebagai: Abdi Sejahtera Nusa dan Bangsa (*Rastra sewakottama*) yang harus berbakti kepada negara dan bangsa/masyarakat Indonesia berdarma sebagai warga negara teladan dari negara (*Nagara Yanottama*) dan waspada sesuai hati nurani masyarakat dalam mendorong terseleenggaranya kesadaran dan kepatuhan hukum (*Yana Anusasana Dharma*).

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik antara lain tentang: Pemuliaan profesi Kepolisian, batasan tugas dan kekuasaan kepolisian, prinsip-prinsip berhubungan dengan masyarakat, prinsip penggunaan upaya paksa, prinsip pengumpulan bukti dan informasi serta perawatan peralatan kepolisian. Untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi moral terhadap pelanggaran etika profesi kepolisian dilaksanakan oleh Komite Kode Etik Polri.



Perubahan Aspek Kultural

Perubahan aspek struktural dan aspek instrumental, bermuara pada aspek kultural karena kesemuanya harus terwujud dalam bentuk dan kualitas pelayanan aktual Polri terhadap masyarakat.

Aspek kultural menggambarkan budaya kepolisian yang akan secara langsung ditanggapi oleh masyarakat, dengan pujian, perasaan puas atau dengan celaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sikap dan perilaku Polri.

Rekrutmen

Satu hal yang banyak disorot dalam kajian kinerja dan profesional Polri ialah kualitas pegawai Polri. Sosok pegawai Polri didiskripsikan sebagai sosok yang korup, arogan, tidak profesional dan citra buruk lainnya. Faktor yang mendasar dalam ikut memberikan kontribusi pada kegagalan membentuk pegawai Polri yang profesional, bersih dan berbudaya ini ialah permasalahan rekrutmen.

Ke depan, rekrutmen pegawai Polri harus mampu menjaring bibit-bibit unggul, melalui motivasi yang menarik baik dari aspek kesejahteraan maupun peluang karier yang akan diperoleh setelah calon diterima menjadi pegawai Polri.

Calon-calon yang akan diseleksi diharapkan memenuhi persyaratan jujur, bertanggungjawab, rela berkorban bagi orang lain, penuh inisiatif, memiliki kestabilan emosi, dan nilai

kemanusiaan yang tinggi, mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik, memiliki postur, fisik dan organ yang baik, serta memiliki tingkat intelegensia yang mampu belajar berbagai pelajaran secara cepat dan benar.

Untuk dapat menjaring calon yang terbaik dari para bibit unggul tadi, Polri akan menyempurnakan penyanggannya melalui metode yang lebih tepat dan benar, antara lain calon memiliki pendidikan umum diutamakan sarjana atau minimal SLTA, memanfaatkan institusi lain yang lebih profesional untuk menjamin objektivitas penilaian, prinsip *local boy for the local job* khususnya untuk mengisi pegawai petugas lapangan Polri, menyelenggarakan *talent scouting* yang lebih cermat, melalui pemberdayaan sub-sub panitia penerimaan, mengadakan pengawasan yang baik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam proses penerimaan.

Di sisi lain dimungkinkan adanya sistem penerimaan pegawai tidak tetap (*out sourcing*) berdasarkan kebutuhan organisasi, sehingga diharapkan akan diperoleh fleksibilitas untuk mengangkat kembali pegawai yang produktivitasnya tinggi/profesional dan memutus kontrak terhadap pegawai yang tidak produktif.

Sistem Pendidikan Polri

Sistem pendidikan Polri yang selama ini diwarnai nuansa militer, berdampak kepada sikap perilaku pe-

gawai Polri yang arogan, tidak profesional, sehingga tidak disukai masyarakat.

Sebagai upaya mewujudkan pegawai Polri yang profesional dan berbudaya, serta mampu mengimbangi tingkat pendidikan masyarakat maka sistem pendidikan Polri disusun berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui pengembangan Ilmu Kepolisian, yang saat ini memiliki konsorsium ilmu kepolisian di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Berbagai substansi pendidikan dan latihan Polri akan direorientasi, termasuk kurikulum pada setiap jenis pendidikan Polri dengan berbagai materi yang terkait erat dengan profesi kepolisian, antara lain penguasaan masalah HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup, kemampuan dialog interaktif maupun muatan lokal/budaya setempat.

Untuk dapat menjadi pegawai Polri, saat ini masih diselenggarakan melalui tiga pintu. Sejalan dengan tuntutan reformasi untuk mewujudkan polisi yang profesional maka penyelenggaraan pendidikan akan diarahkan melalui dua pintu, yaitu untuk setingkat petugas lapangan Polri (*police worker*) dan setingkat penyelia lapangan Polri (*first line supervisor*), dan selanjutnya menuju ke sistem satu pintu. Sebelum diangkat menjadi pegawai Polri, maka terlebih dahulu diberikan kesempatan magang sebagai upaya pembentukan mental kepribadian calon pegawai Polri yang baik. Bagi yang tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan, bagi yang memenuhi syarat akan dilantik menjadi pegawai Polri yang ditandai dengan pengucapan sumpah dan pernyataan penerimaan Kode Etik Polri.

Jenjang pendidikan Polri disusun untuk memperoleh kemampuan/kualifikasi keahlian melalui pola pendidikan strata 1, 2 dan 3 serta kerja sama pendidikan baik dalam maupun luar negeri. Kualifikasi ketrampilan melalui pola pendidikan D1 untuk setingkat petugas lapangan Polri (*police worker*), D3 untuk setingkat penyelia lapangan Polri (*first line supervisor*), serta melalui kejuruan. Kualifikasi manajerial melalui pola pendidikan manajerial tingkat menengah, tingkat atas. ■

Polri Jajaki Kerja sama Pendidikan dengan Kepolisian Inggris

Tahap pertama Polri akan mengirim beberapa personil Polri ke Inggris untuk dididik menjadi tenaga instruktur.

Untuk menjajaki penempatan konsultan Kepolisian Inggris di bidang pendidikan Polri, Assistant Chief Constable Inggris Mike Bowron mengadakan kunjungan ke Kapolri, Senin, 27 September 1999.

Dalam pertemuan ini, hadir Steve dari First Brook Foreign dan Commonwealth Office dan Sekretaris III Dubes Inggris, sedangkan Kapolri didampingi beberapa pejabat teras Mabes Polri.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Roesmanhadi, SH mengatakan rencana kerja sama pendidikan antara Polri dengan Kepolisian Inggris, pada tahap pertama Polri akan mengirim beberapa personil Polri ke Inggris untuk dididik menjadi tenaga instruktur sehingga nanti ada regenerasi tenaga instruktur di lembaga Pendidikan Polri. Untuk menindaklanjuti penajakan kerja sama ini, pihak Polri dalam waktu dekat akan membuat MoU dengan Kepolisian Inggris.

Dalam kunjungan ini, Assistant Chief Constable Inggris juga menanyakan peristiwa penembakan terhadap mahasiswa dan anggota masyarakat yang melakukan unjuk rasa menentang UU Penanggulangan Keadaan Bahaya yang beberapa bulan lalu menewaskan tujuh orang pengunjung rasa di mana satu orang di antaranya (Alm Yun Hap) tewas diduga oleh peluru tajam, sementara yang lainnya karena peluru karet.

Kapolri mengatakan, untuk sementara disimpulkan peluru yang ditemukan di tubuh korban Yun Hap bukan milik TNI ataupun Polri. Namun demikian kasus ini masih dalam penelitian Puslabfor Polri, kata Kapolri.

Menanggapi sikap Polri dalam menghadapi pengunjuk rasa di Indonesia, Assistant Chief Constable Inggris menilai Polri dalam menghadapi pengunjuk rasa lebih sabar sedangkan di Inggris polisi dalam menghadapi pengunjuk rasa lebih agresif.

Menyinggung pakaian baru yang digunakan Polri, Kapolri menjelaskan bahwa pakaian tersebut tidak banyak perubahan, hanya warna bajunya yang berubah sedikit, kata Kapolri. ■



Heru Sutowo dan Suwito

"Juru Keker"

Dispen Polri yang Rela Pertaruhkan Nyawa

Heru Sutowo (48), dan Suwito (48) boleh dibilang termasuk pencatat perjalanan Polri yang tekun dan konsisten melalui "laporan pandangan mata" mereka. Melalui rekaman video dan bidikan kamera hampir semua aktivitas penting di lingkungan Mabes Polri mereka abadikan dalam kurun waktu yang relatif panjang. Perjalanan dan kegiatan Kapolri di era Jenderal Polisi Drs Widodo Budidarmo (1974 -1978) hingga Kapolri yang sekarang, Jenderal Polisi Roesmanhadi, SH mereka abadikan dan dokumentasikan dengan baik.

Heru Sutowo, ayah lima anak ini mulai bekerja di Dispen Polri sejak tahun 1970. Awalnya sebagai tenaga tik dan juru foto majalah *Warta Bhayangkari*. Sampai akhirnya tahun 1976, Dispen membutuhkan tenaga yang ahli dalam bidang dokumentasi, terutama kameramen. Dispen, kalau sebelumnya menggunakan tenaga dari luar untuk peliputan, akhirnya terpikirkan untuk memiliki tenaga sendiri.

Ketika itu, tahun 1976. Sejumlah instansi, seperti Mabes ABRI, AU dan Dispen Polri mendapatkan kesempatan belajar pendidikan di bidang kameramen. Jadilah, Heru Sutowo ditunjuk Dispen Polri untuk mengikuti pendidikan sinematografi di TIM.

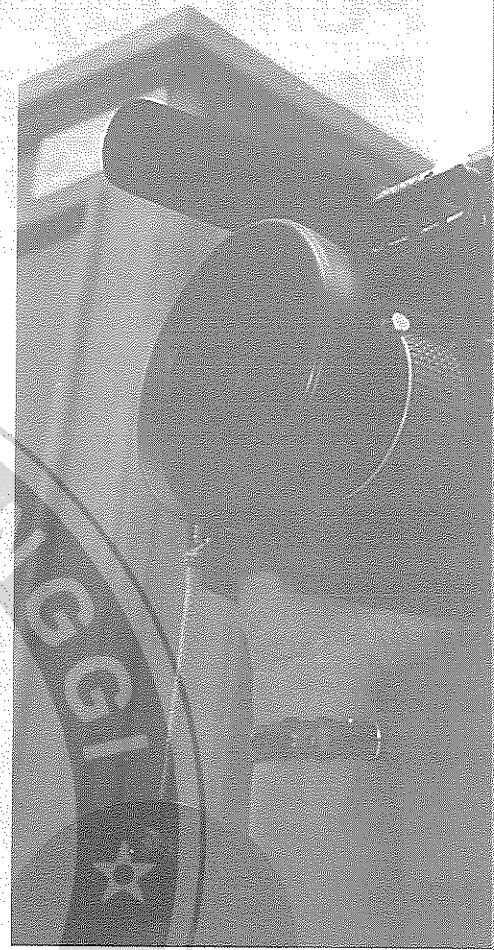
"Saya mengikuti pendidikan sinematografi di Taman Ismail Marzuki



Suwito

(TIM). Untuk bisa mengoperasikan peralatan, saya harus belajar selama tiga bulan. *Alhamdulillah* saya bisa menguasainya dan bermanfaat juga bagi rekan yang lebih junior karena saya membagi ilmu dengan mereka," papar Heru Sutowo bangga.

Meski bekerja sebagai sipil, ia juga dibekali ilmu layaknya anggota polisi lainnya. Hanya bedanya pendidikan yang ia ikuti tidak seberat anggota kepolisian. Misalnya ia pernah mengikuti latihan Santi Siaga I



Heru Sutowo

di Banten tahun 1980. Tahun 1981 ia ikut Latgap di Irian Jaya. Saat Timtim berintegrasi ke Republik Indonesia, ia juga diterjunkan di Timtim bersama tim lainnya. "Semua latihan itu sebagai bekal agar kita waspada karena tugas kita tidak lepas dari berbagai ancaman. Untuk jaga-jaga, karena tugas kita tidak lepas dari risiko," paparnya.

Baginya, pekerjaan yang diembannya merupakan pengabdian. Makanya pekerjaan itu ia tekuni dengan rasa senang. Pekerjaan, paparnya jika dijiwai akan membuahkan hasil yang maksimal. Karena ia sudah mencintai pekerjaan, maka ia tidak pernah menolok tugas apapun yang diberikan kepadanya, termasuk tugas meliputi demonstrasi mahasiswa atau saat terjadi kerusuhan medio Mei 1998 lalu. Ketika itu ia berada di tengah-tengah massa, di antara desing peluru dan hamburan batu. Menurutnya untuk menghasilkan gambar ter-